

Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai Katalisator Perekonomian Regional: Pendekatan IRIO

The Impact of the Development of the Capital City of Nusantara (IKN) as a Catalyst for Regional Economic Growth: The IRIO Approach

Mutiara Probokawuryan¹, Wildan Nur Arrasyiid Sane Pratinda², Zulva Azijah², Syarifah Amaliah², Salma Luthfia Zain², Aisyah Nur'aeni²

¹Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

²Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Jl. Agatis, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia

*Korespondensi: mutiprobo@apps.ipb.ac.id

[diterima 17-04-2025: revisi 03-06-2025: diterbitkan 31-07-2025]

ABSTRAK

Ketimpangan ekonomi *antar wilayah* di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan nasional. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dipandang sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa guna mengurangi ketimpangan ekonomi *antar wilayah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi dalam pembangunan IKN terhadap perekonomian nasional menggunakan pendekatan *Inter Regional Input-Output* (IRIO) Indonesia, khususnya untuk melihat dampaknya terhadap output ekonomi, pendapatan rumah tangga, serta penyerapan tenaga kerja. Metode analisis yang digunakan adalah *Inter Regional Input-Output* (IRIO) Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan investasi pemerintah dalam pembangunan IKN, berupa investasi pada sektor konstruksi, tidak hanya berdampak signifikan terhadap wilayah Kalimantan Timur saja, tetapi juga dampak output dirasakan oleh wilayah lainnya seperti Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Kalimantan Utara serta Jawa Barat. Sementara itu, dampak pendapatan dan tenaga kerja juga dirasakan berada di Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera dan sebagian kecil lainnya di Pulau Bali-Nusra serta Maluku dan Papua. Perlu penguatan kebijakan diversifikasi ekonomi dan dukungan sektor terkait di luar Kalimantan guna memperluas efek *spillover* pembangunan IKN secara nasional.

Kata kunci: *IKN, IRIO, Ketimpangan*

ABSTRACT

Economic disparities between regions in Indonesia remain one of the main challenges in the national development process. The development of the National Capital City (IKN) is seen as an effort to create a new economic growth center outside Java Island to reduce regional economic inequality. This study aims to analyze the impact of investment in IKN development on the national economy using the Indonesian Inter-Regional Input-Output (IRIO) approach, particularly to assess its effects on economic output, household income, and employment absorption. The analysis method used is the 2016 Indonesian Inter-Regional Input-Output (IRIO) model. The findings indicate that increased government investment in IKN development, particularly in the construction sector, has a significant impact on East Kalimantan but also generates output effects in other regions, such as Jakarta, East Java, North Kalimantan, and West Java. Meanwhile, income and labor impacts are also observed in Java Island, Sulawesi Island, Sumatra Island, and partially in Bali-Nusa Tenggara (Balinusra), as well as Maluku and Papua. It is necessary to strengthen economic diversification policies and support for related sectors outside Kalimantan in order to broaden the nationwide spillover effects of the IKN development.

Keywords: *Disparity, IKN, IRIO*

JEL classification: *R11, R12, R15, H54, J21*

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi *antar wilayah* di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam proses pembangunan nasional. Beberapa wilayah, terutama di Pulau Jawa, mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah lainnya, termasuk Kalimantan dan wilayah timur Indonesia. Kesenjangan ini terlihat dari berbagai indikator, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, distribusi infrastruktur, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Sebagai ilustrasi, kondisi ketimpangan *antar wilayah* direfleksikan dengan relatif tingginya nilai PDRB Provinsi di kawasan Indonesia Barat dan Timur. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, PDRB per kapita di DKI Jakarta mencapai Rp 275 juta, 1.5 kali lebih tinggi dibandingkan di Kalimantan Timur yakni Rp 183.2 juta, serta lima kali lebih tinggi dibandingkan Provinsi Papua yang mencatat angka yang jauh lebih rendah, hanya sekitar Rp 54 juta. Ketimpangan ini juga tercermin dalam distribusi investasi, di mana sekitar 54% investasi nasional masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah lain mendapatkan porsi yang jauh lebih kecil (BKPM, 2022).

Dalam visi Indonesia 2045, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara maju bahkan menjadi salah satu ekonomi terbesar di Indonesia, yakni melalui kerangka implementasi transformasi untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan (Republik Indonesia, 2024). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerataan pembangunan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu strategi utama yang diusung adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dipandang sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa guna mengurangi ketimpangan ekonomi *antar wilayah*.

Sebagai pusat administrasi dan bisnis, DKI Jakarta menghadapi berbagai tantangan besar, seperti kepadatan penduduk yang tinggi,

kemacetan parah, serta permasalahan lingkungan dan geologi yang akut, termasuk penurunan tanah yang semakin mengkhawatirkan (Amila *et al.*, 2022). Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis, termasuk letaknya yang berada di tengah wilayah Indonesia, minimnya risiko bencana alam, serta ketersediaan lahan luas yang memungkinkan pengembangan infrastruktur secara optimal. Selain itu, wilayah ini juga memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pertambangan dan sektor energi.

Investasi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pembangunan suatu wilayah baru. Dalam konteks IKN, investasi, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, sangat diperlukan untuk membangun infrastruktur dasar, menarik modal tambahan, serta menggerakkan aktivitas ekonomi lokal. Pembangunan IKN diproyeksikan membutuhkan investasi hingga Rp 466 triliun, di mana sekitar 20% berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPB) (Kementerian Keuangan, 2022). Investasi tersebut mencakup proyek infrastruktur utama, seperti pembangunan jalan tol, sistem transportasi massal, pengelolaan air bersih, serta berbagai fasilitas publik dan perkantoran. Dengan adanya investasi dalam skala besar ini, diharapkan dapat memberikan dampak luas terhadap sektor-sektor ekonomi di seluruh Indonesia.

Dampak ekonomi dari pembangunan IKN tidak hanya terbatas pada sektor konstruksi tetapi juga berpotensi memengaruhi berbagai sektor lainnya, termasuk industri manufaktur, perdagangan, jasa keuangan, serta transportasi dan logistik. Pembangunan ibu kota baru diperkirakan akan menciptakan permintaan terhadap barang dan jasa yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produksi industri nasional. Sektor manufaktur, misalnya, dapat mengalami peningkatan produksi material konstruksi, peralatan listrik, serta barang konsumsi yang dibutuhkan oleh penduduk dan pelaku usaha di IKN. Di sektor perdagangan, arus barang dan jasa juga diperkirakan akan meningkat seiring dengan

pertumbuhan populasi dan aktivitas bisnis di ibu kota baru.

Dampak ekonomi pembangunan IKN akan berpengaruh di tingkat regional maupun nasional. Di tingkat regional, adanya proyek pembangunan berskala besar maka sektor konstruksi dan jasa akan berpotensi mengalami pertumbuhan yang pesat, yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Peningkatan aktivitas ekonomi juga berpeluang meningkatkan daya beli masyarakat dan menggerakkan sektor-sektor lain seperti pariwisata, ritel, dan perhotelan. Selain itu, investasi dalam infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antar Provinsi di Pulau Kalimantan, yang memungkinkan hubungan ekonomi yang lebih erat antara Kalimantan Timur dan provinsi lainnya seperti Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara.

Pada skala nasional, pembangunan IKN diharapkan dapat berkontribusi terhadap daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dengan adanya infrastruktur yang lebih merata dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa, biaya logistik nasional dapat ditekan, yang berpotensi meningkatkan efisiensi rantai pasok nasional. Selain itu, peningkatan investasi di berbagai sektor diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif. Sejumlah studi telah menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara dapat memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap berbagai sektor ekonomi, tetapi tingkat dan distribusi dampaknya masih perlu diteliti lebih dalam. Berdasarkan analisis dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), pembangunan IKN diperkirakan akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 0.1%, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah sekitar Kalimantan Timur. Lebih lanjut, temuan Yusuf *et al.* (2023) dengan menggunakan *inter-regional computable general equilibrium* menunjukkan potensi dampak ekspansi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Timur yang mencapai 22%. Pertumbuhan yang signifikan ini diprediksi disebabkan oleh berkembangnya sektor-sektor jasa dan sektor yang membutuhkan

tenaga kerja terampil. Temuan ini juga mengkonfirmasi akselerasi transformasi struktural Kalimantan Timur ke arah sektor jasa dengan potensi peningkatan kontribusi sektoral mencapai 12 %. Mencermati hal tersebut, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam hasil analisis mengenai potensi dampak ekonomi pembangunan IKN yang menitikberatkan pada keterkaitan sektoral dan antawilayah. Sangatlah penting untuk memastikan bahwa pembangunan IKN benar-benar dapat memberikan manfaat ekonomi yang luas sehingga target dalam visi Indonesia 2045 dapat tercapai.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi dalam pembangunan IKN terhadap perekonomian nasional menggunakan Tabel Inter Regional Input-Output (IRIO) Indonesia, khususnya untuk melihat dampaknya terhadap output ekonomi, pendapatan rumah tangga, serta penyerapan tenaga kerja. Dengan memahami bagaimana investasi ini *memengaruhi* struktur ekonomi secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi terkait pengembangan sektor yang berdampak positif akibat pembangunan IKN baik di Provinsi Kalimantan Timur maupun provinsi lainnya, penguatan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan perdagangan antar wilayah serta perbaikan sistem logistik, serta penguatan ekosistem kebijakan yang mendukung investasi bagi para pembuat kebijakan dalam mendukung strategi pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan di Indonesia.

METODE

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Tabel *Inter Regional Input-Output* (IRIO) Indonesia tahun 2016 dengan klasifikasi 52 sektor dan 34 provinsi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tabel IRIO yang digunakan adalah tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen, dikarenakan BPS hanya mempublikasikan satu jenis Tabel IRIO tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari berbagai sumber seperti BPS, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR), Otoritas Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur, serta berbagai sumber data pendukung lainnya yang relevan seperti literatur dari berbagai publikasi ilmiah.

Metode Analisis

Spesifikasi Model IRIO

Secara operasional, Tabel IRIO merupakan hasil pengembangan dari Tabel Input-Output (IO). Hal ini dapat dilihat dari Tabel IRIO yang fokus pada lebih dari satu wilayah (*multi regions*), sementara Tabel IO hanya fokus pada satu wilayah (*single region*). Apabila mengacu pada Tabel IO Indonesia tahun 2016, terdapat dua jenis tabel transaksi yang digunakan, yaitu transaksi total dan transaksi domestik. Transaksi total mencakup semua transaksi barang dan jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Sementara pada transaksi domestik hanya mencakup transaksi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan produksi di dalam negeri. Tabel IO Indonesia tahun 2016 juga menggunakan dua jenis harga untuk penilaian setiap transaksi yang digunakan, yaitu harga pembeli dan harga produsen. Pada transaksi atas dasar harga pembeli, semua transaksi dinilai atas dasar harga yang dibayar oleh pembeli yang mencakup juga margin perdagangan dan biaya pengangkutan, sedangkan pada transaksi atas dasar harga produsen yang digunakan sebagai

dasar penilaian adalah harga dari produsen barang dan jasa yang bersangkutan tanpa margin perdagangan dan biaya pengangkutan (BPS, 2021). Dengan demikian Tabel IO Indonesia tahun 2016 yang disusun oleh BPS terdiri atas tiga penilaian transaksi, yaitu:

- 1) Transaksi total atas dasar harga pembeli
- 2) Transaksi total atas dasar harga produsen
- 3) Transaksi domestik atas dasar harga produsen

Sementara itu, berkaitan dengan Tabel IRIO Indonesia tahun 2016 yang telah dipublikasikan oleh BPS pada tahun 2021 disusun berdasarkan transaksi domestik atas dasar harga produsen. Oleh karena itu, transaksi barang dan jasa yang dicakup pada Tabel IRIO Indonesia menggambarkan arus barang dan jasa yang dihasilkan industri di suatu wilayah yang kemudian digunakan baik oleh wilayah tersebut maupun wilayah lainnya dalam negeri. Secara umum, kerangka dasar Tabel IRIO dapat dilihat pada Gambar 1.

Selanjutnya, untuk melihat dampak dari adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, maka akan digunakan model IRIO tersebut. Database yang akan digunakan adalah Tabel IRIO Indonesia tahun 2016 yang meliputi 34 provinsi dan 52 sektor. Secara lebih rinci provinsi yang terdapat pada Tabel IRIO Indonesia tahun 2016 ditunjukkan pada Tabel 1.

Deskripsi				Permintaan Antara						Permintaan Akhir						Ekspor	Total Output
				1. Provinsi Aceh .. 34. Provinsi Papua			Industri .. Industri			1. Provinsi Aceh .. 34. Provinsi Papua			Industri .. Industri				
Input Antara	1. Provinsi Aceh	Industri	1	X _{ij} ^{AA}			X _{ij} ^{AB}			F _{ij} ^{AA}			F _{ij} ^{AB}			E _i ^A	X _j ^A
	:	:	:							
	52									
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	34. Provinsi Papua	Industri	1	X _{ij} ^{BA}			X _{ij} ^{BB}			F _{ij} ^{BA}			F _{ij} ^{BB}			E _i ^B	X _j ^B
	:	:	:							
	52									
Impor				X _j ^{MA}			X _j ^{MB}			F _j ^{MA}			F _j ^{MB}				
Input Primer				V _j ^A			V _j ^B										
Total Input				X _j ^A			X _j ^A										

Sumber: BPS (2021)

Gambar 1. Kerangka Dasar Tabel IRIO Indonesia

Tabel 1. Rincian Provinsi pada IRIO Indonesia 2016

No.	Provinsi	No.	Provinsi
1	Aceh	18	Nusa Tenggara Barat
2	Sumatera Utara	19	Nusa Tenggara Timur
3	Sumatera Barat	20	Kalimantan Barat
4	Riau	21	Kalimantan Tengah
5	Jambi	22	Kalimantan Selatan
6	Sumatera Selatan	23	Kalimantan Timur
7	Bengkulu	24	Kalimantan Utara
8	Lampung	25	Sulawesi Utara
9	Kep. Bangka Belitung	26	Sulawesi Tengah
10	Kep. Riau	27	Sulawesi Selatan
11	DKI Jakarta	28	Sulawesi Tenggara
12	Jawa Barat	29	Gorontalo
13	Jawa Tengah	30	Sulawesi Barat
14	DI Yogyakarta	31	Maluku
15	Jawa Timur	32	Maluku Utara
16	Banten	33	Papua Barat
17	Bali	34	Papua

Sumber: BPS (2021)

Selanjutnya pada Tabel 2, dapat dilihat rincian 52 sektor yang terdapat pada Tabel IRIO Indonesia tahun 2016. Dalam penelitian ini tidak dilakukan proses agregasi terhadap sektor-sektor pada Tabel IRIO, sehingga seluruh sektor akan digunakan dalam analisis.

Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah untuk Pembangunan IKN

Analisis dampak dilakukan untuk mengetahui bagaimana struktur perekonomian apabila diberikan sebuah guncangan (*shock*). Dari sisi permintaan (*demand side*), *shock* tersebut dapat berupa perubahan konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor (Sahara *et al.*, 2024). Oleh karena itu, analisis dampak pada penelitian ini dilakukan dengan menyimulasikan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Dari hasil simulasi tersebut, akan terlihat sejauh mana dampak dari pengeluaran pemerintah tersebut terhadap sektor-sektor dalam perekonomian sebagai akibat dari adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tahun 2022, pembangunan IKN pada periode tahun

2022-2024 difokuskan pada pemenuhan infrastruktur dasar (penyediaan air minum, pengelolaan persampahan dan air limbah serta teknologi informasi dan komunikasi) serta sarana utama (istana kepresidenan, perkantoran, dan perumahan). Dengan dasar Perpres tersebut maka simulasi (*shock*) pada penelitian ini dilakukan pada sektor konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur dan diproksi dari besaran nilai pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN selama periode tahun 2022 – 2024, yaitu sebesar Rp 75.90 triliun (Tabel 3).

Analisis dampak pada IRIO sangat penting karena pandangan komprehensif tentang saling ketergantungan ekonomi di seluruh wilayah dan sektor (Ariutama *et al.* 2022). Analisis ini memungkinkan penilaian dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan fiskal seperti belanja pemerintah, yang mengungkap bagaimana pengeluaran pemerintah di satu wilayah atau sektor dapat memengaruhi sektor-sektor pada wilayah lain. Analisis ini juga sangat efektif dalam menangkap dampak pengganda belanja pemerintah, yang dapat mengukur pertumbuhan ekonomi di luar wilayah investasi awal (Luque *et al.* 2011).

Tabel 2. Rincian Klasifikasi 52 Sektor pada IRIO Indonesia 2016

No	Sektor	No	Sektor
1	Pertanian Tanaman Pangan	27	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
2	Pertanian Tanaman Hortikultura Semusim, Hortikultura Tahunan, dan Lainnya	28	Ketenagalistrikan
3	Perkebunan Semusim dan Tahunan	29	Pengadaan Gas dan Produksi Es
4	Peternakan	30	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang
5	Jasa Pertanian dan Perburuan	31	Konstruksi
6	Kehutanan dan Penebangan Kayu	32	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya
7	Perikanan	33	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor
8	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	34	Angkutan Rel
9	Pertambangan Batubara & Lignit	35	Angkutan Darat
10	Pertambangan Bijih Logam	36	Angkutan Laut
11	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	37	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
12	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	38	Angkutan Udara
13	Industri Makanan dan Minuman	39	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir
14	Industri Pengolahan Tembakau	40	Penyediaan Akomodasi
15	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	41	Penyediaan Makan Minum
16	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	42	Jasa Informasi dan Komunikasi
17	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	43	Jasa Perantara Keuangan Selain Bank Sentral
18	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	44	Asuransi dan Dana Pensiun
19	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	45	Jasa Keuangan Lainnya
20	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	46	Jasa Penunjang Keuangan
21	Industri Barang Galian bukan Logam	47	Real Estate
22	Industri Logam Dasar	48	Jasa Perusahaan
23	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	49	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
24	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	50	Jasa Pendidikan
25	Industri Alat Angkutan	51	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
26	Industri Furnitur	52	Jasa Lainnya

Sumber: BPS (2021)

Tabel 3. Nilai Investasi/Pengeluaran Pemerintah untuk Pembangunan IKN

Tahun	Nilai Investasi/Pengeluaran Pemerintah untuk
	Pembangunan IKN (Triliun Rupiah)
2022	5.50
2023	27.00
2024	43.40
Total	75.90

Sumber: Kementerian Keuangan (2024)

Hasil studi terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ariutama *et al.* (2022) menunjukkan bahwa dampak dari adanya belanja pemerintah melalui stimulus fiskal pada sektor pertanian Provinsi Bali telah menghasilkan dampak ekonomi dua setengah kali lebih besar daripada nilai stimulus awalnya. Begitu juga studi Allo *et al.* (2022) yang menunjukkan bahwa adanya investasi pada sektor ketenagalistrikan Indonesia telah menghasilkan manfaat ekonomi tidak hanya di wilayah tersebut tetapi juga di wilayah lainnya. Namun demikian, studi ini menunjukkan bahwa adanya investasi pada sektor ketenagalistrikan tersebut akan menguntungkan wilayah Jawa karena konsentrasi industrinya. Hal ini menunjukkan perlunya realokasi strategis untuk menyeimbangkan pembangunan regional dan mengatasi ketimpangan wilayah. Artinya analisis dampak ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai dampak ekonomi dari adanya investasi saja, tetapi juga dapat menyoroti tantangan potensial yang akan terjadi, seperti kesenjangan pembangunan antar wilayah (Luque *et al.*, 2011).

Berbagai studi terdahulu lainnya juga telah menjelaskan bahwa penerapan analisis dampak dengan pendekatan IRIO selain mampu memberikan gambaran terkait dampak ekonomi yang ditimbulkan tetapi juga mampu memberikan gambaran mengenai potensi terjadinya kesenjangan antar wilayah (Okadera *et al.*, 2014; Jahn, 2015). Oleh karena itu, dengan memanfaatkan hasil analisis dampak IRIO, kebijakan dapat diarahkan agar alokasi sumber daya dapat dilakukan secara lebih adil dan memastikan bahwa wilayah dengan kebutuhan yang lebih tinggi menerima dukungan yang sesuai.

Analisis dampak pada penelitian akan melihat seberapa besar perubahan atau dampak yang ditimbulkan dari adanya pengeluaran pemerintah

tersebut terhadap tiga komponen, yaitu output, pendapatan, dan tenaga kerja. Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam analisis dampak (*impact analysis*) pada penelitian ini (Sahara *et al.*, 2024) dimodifikasi dari Miller dan Blair (2009):

a. Dampak terhadap output:

Perubahan output di wilayah P sektor i

$$\Delta X_i^P = \sum_{j=1}^n k_{ij}^{PP} \Delta Y_j^P + \sum_{j=1}^n k_{ij}^{PQ} \Delta Y_j^Q$$

Perubahan output di wilayah Q sektor i

$$\Delta X_i^Q = \sum_{j=1}^n k_{ij}^{QP} \Delta Y_j^P + \sum_{j=1}^n k_{ij}^{QQ} \Delta Y_j^Q$$

Keterangan:

ΔX_i^P = perubahan output sektor i wilayah P

ΔX_i^Q = perubahan pendapatan sektor i wilayah Q

k_{ij}^{PP} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah P terhadap sektor j wilayah P

k_{ij}^{PQ} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah P terhadap sektor j wilayah Q

k_{ij}^{QP} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah Q terhadap sektor j wilayah P

k_{ij}^{QQ} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah Q terhadap sektor j wilayah Q

ΔY_j^P = perubahan permintaan akhir (*final demand*) sektor j provinsi P

ΔY_j^Q = perubahan permintaan akhir (*final demand*) sektor j provinsi Q

b. Dampak terhadap pendapatan:

Perubahan pendapatan di wilayah P sektor i

$$\Delta W_i^P = w_i^P \left(\sum_{j=1}^n k_{ij}^{PP} \Delta Y_j^P + \sum_{j=1}^n k_{ij}^{PQ} \Delta Y_j^Q \right)$$

Perubahan pendapatan di wilayah Q sektor i

$$\Delta W_i^Q = w_i^Q \left(\sum_{j=1}^n k_{ij}^{QP} \Delta Y_j^P + \sum_{j=1}^n k_{ij}^{QQ} \Delta Y_j^Q \right)$$

Keterangan:

ΔW_i^P = perubahan pendapatan sektor i wilayah P

ΔW_i^Q = perubahan pendapatan sektor i wilayah Q

w_i^P = koefisien pendapatan sektor i wilayah P

w_i^Q = koefisien pendapatan sektor i wilayah Q

k_{ij}^{PP} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah P terhadap sektor j wilayah P

k_{ij}^{PQ} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah P terhadap sektor j wilayah Q

k_{ij}^{QP} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah Q terhadap sektor j wilayah P

k_{ij}^{QQ} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah Q terhadap sektor j wilayah Q

ΔY_j^P = perubahan permintaan akhir (*final demand*) sektor j provinsi P

ΔY_j^Q = perubahan permintaan akhir (*final demand*) sektor j provinsi Q

c. Dampak terhadap tenaga kerja:

Perubahan tenaga kerja di wilayah P sektor i

$$\Delta T_i^P = t_i^P \left(\sum_{j=1}^n k_{ij}^{PP} \Delta Y_j^P + \sum_{j=1}^n k_{ij}^{PQ} \Delta Y_j^Q \right)$$

Perubahan tenaga kerja di wilayah Q sektor i

$$\Delta T_i^Q = t_i^Q \left(\sum_{j=1}^n k_{ij}^{QP} \Delta Y_j^P + \sum_{j=1}^n k_{ij}^{QQ} \Delta Y_j^Q \right)$$

Keterangan:

ΔT_i^P = perubahan tenaga kerja sektor i wilayah P

ΔT_i^Q = perubahan tenaga kerja sektor i wilayah Q

t_i^P = koefisien tenaga kerja sektor i wilayah P

t_i^Q = koefisien tenaga kerja sektor i wilayah Q

k_{ij}^{PP} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah P terhadap sektor j wilayah P

k_{ij}^{PQ} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah P terhadap sektor j wilayah Q

k_{ij}^{QP} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah Q terhadap sektor j wilayah P

k_{ij}^{QQ} = unsur nilai matriks kebalikan Leontief sektor i wilayah Q terhadap sektor j wilayah Q

ΔY_j^P = perubahan permintaan akhir (*final demand*) sektor j provinsi P

ΔY_j^Q = perubahan permintaan akhir (*final demand*) sektor j provinsi Q

Asumsi Dasar Model IRIO

Berdasarkan BPS (2021), penyusunan Tabel IRIO didahului dengan penyusunan tabel penyediaan dan penggunaan (*supply and use tables/SUT*) dan Tabel Input-Output (IO) 34 provinsi Indonesia. Oleh karena itu, sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam proses penyusunan tersebut, model IO dan IRIO bersifat statis dan terbuka. Asumsi dasar lainnya adalah:

1. Keseragaman (*homogeneity*) merupakan asumsi yang menyatakan bahwa setiap sektor ekonomi hanya memproduksi satu jenis barang dan jasa dengan input tunggal (seragam) dan tidak ada substitusi otomatis terhadap input dari output sektor yang berbeda.

2. Kesebandingan (*proportionality*) merupakan asumsi yang menyatakan bahwa hubungan antara input dan output pada setiap sektor produksi merupakan fungsi linier, artinya kenaikan dan penurunan output suatu sektor akan sebanding dengan kenaikan dan penurunan input yang digunakan oleh sektor tersebut.

- Penjumlahan (*additivity*) merupakan asumsi yang menyatakan bahwa total efek dari kegiatan produksi di berbagai sektor merupakan penjumlahan dari efek kegiatan masing-masing sektor yang terpisah.

Keterbatasan Model IRIO

Berdasarkan asumsi di atas, maka Tabel IRIO memiliki beberapa keterbatasan, di mana koefisien input atau koefisien teknis diasumsikan tetap (konstan) selama periode analisis. Koefisien teknis yang diasumsikan tetap tersebut membuat teknologi yang digunakan oleh sektor-sektor ekonomi dalam proses produksi pun dianggap tetap atau tidak ada perubahan selama periode analisis. Hal ini menyebabkan perubahan kuantitas dan harga input akan selalu sebanding dengan perubahan kuantitas dan harga output atau dengan kata lain tidak mencerminkan perubahan harga relatif antar wilayah atau perubahan teknologi, (BPS, 2021).

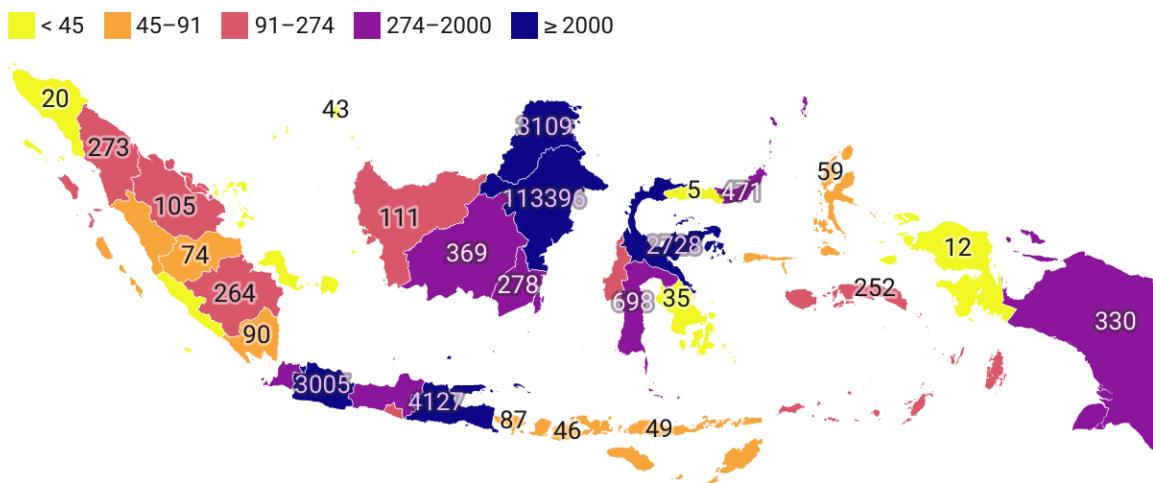
Di samping itu, pada analisis IRIO belum memasukkan adanya konstrain atau keterbatasan sumber daya dalam proses produksi. Pada analisis IRIO, produksi dapat terus ditingkatkan tanpa adanya kendala atau konstrain dalam penyediaan sumber daya. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa ketersediaan sumber daya di dunia ini relatif terbatas (Zhang *et al.*, 2013). Keterbatasan lainnya yang terdapat pada Analisis IRIO, yaitu institusi-institusi (pelaku ekonomi) semuanya diperlakukan sebagai *endogenous factor*. *Endogenous factor* dalam analisis IRIO hanya terdiri atas sektor-sektor produksi saja. Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi perubahan kebijakan (misalnya ekspor, pajak, investasi dan lain-lain), maka dampak dari kebijakan tersebut hanya bisa terjadi di sektor-sektor perekonomian saja. (Sahara, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN sebesar Rp 75.90 triliun yang diinjeksikan pada sektor konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan dampak pada peningkatan output yang sebarannya dapat dilihat pada Gambar 2. Secara total, pembangunan

IKN berdampak pada peningkatan output Indonesia sebesar Rp 138.71 triliun. Jika dilihat secara regional, dampak paling tinggi berada di Pulau Kalimantan dengan peningkatan output sebesar Rp 117.26 triliun. Sementara itu, dampak di luar Pulau Kalimantan secara total adalah sebesar Rp 21.64 triliun dengan peningkatan output tertinggi berada di Pulau Jawa sebesar Rp 15.76 triliun, Pulau Sulawesi sebesar Rp 5.05 triliun, Pulau Sumatera sebesar Rp 992.08 miliar, dan sebagian kecil lainnya di Pulau Bali-Nusra serta Maluku dan Papua. Hal ini sejalan dengan penelitian Hung *et al.* (2019) yang mendapati bahwa adanya pembangunan pada suatu wilayah, maka akan meningkatkan permintaan bahan dan jasa untuk menunjang pembangunan tersebut. Lee *et al.* (2018) menambahkan bahwa peningkatan permintaan barang dan jasa tersebut akan direspon oleh sektor-sektor yang berada di wilayah tersebut, maupun yang berasal dari luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, adanya pembangunan IKN di wilayah Kalimantan Timur, tidak hanya akan meningkatkan output sektor-sektor wilayah itu sendiri, tetapi juga akan berdampak pada peningkatan output wilayah lain.

Apabila dilihat berdasarkan provinsi, maka Kalimantan Timur merupakan Provinsi yang paling besar menerima dampak peningkatan output, yaitu sebesar Rp 113.95 triliun atau 81.63% dari total dampak adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN di sektor konstruksi Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta dengan peningkatan output sebesar Rp 6.85 triliun, Provinsi Jawa Timur dengan peningkatan output sebesar Rp 4.12 triliun, Provinsi Kalimantan Utara dengan peningkatan output sebesar Rp 3.10 triliun, Provinsi Jawa Barat dengan peningkatan output sebesar Rp 3.00 triliun, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan peningkatan output sebesar Rp 2.72 triliun. Peningkatan output yang terjadi di provinsi lain menunjukkan bahwa adanya investasi pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur mampu memberikan *multiplier effect* pada pertumbuhan output provinsi lain (Hidayat, 2021).



Gambar 2. Dampak Output dari Investasi Pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur

Hal ini disebabkan karena adanya investasi yang utamanya diinjeksi pada sektor konstruksi tersebut akan mendorong mobilisasi barang dan jasa yang diperlukan untuk pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur, baik barang dan jasa yang berasal dari wilayah itu sendiri maupun yang berasal dari wilayah lain. Sehingga adanya pembangunan tersebut tidak hanya berdampak pada wilayah itu sendiri tetapi juga akan berdampak pada provinsi lain yang outputnya digunakan untuk mendukung pembangunan (Permana dan Asmara, 2010; Hassan *et al.* 2018)

Selain dilihat secara regional, dampak peningkatan output juga dapat dilihat secara sektoral, sektor yang mengalami peningkatan output paling besar di Pulau Kalimantan adalah sektor konstruksi itu sendiri, dengan peningkatan output sebesar Rp 76.34 triliun. Selanjutnya untuk Pulau Jawa, sektor yang mengalami peningkatan output paling besar adalah sektor industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik dengan peningkatan output sebesar Rp 4.38 triliun. Untuk Pulau Sulawesi, sektor yang mengalami peningkatan output paling besar adalah sektor industri barang galian bukan logam dengan peningkatan output sebesar Rp 2.23 triliun. Untuk Pulau Maluku dan Papua, sektor yang mengalami peningkatan output paling besar adalah sektor pertambangan bijih logam dengan peningkatan output sebesar Rp 321.99 miliar. Untuk Pulau Sumatera, sektor yang mengalami peningkatan output paling besar adalah sektor perkebunan semusim dan tahunan dengan

peningkatan output sebesar Rp 178.66 miliar serta untuk Pulau Bali-Nusra, sektor yang mengalami peningkatan output paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor dengan peningkatan output sebesar Rp 39.77 miliar.

Berdasarkan dampak tersebut, adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN yang pada penelitian ini diintroduksikan melalui sektor konstruksi Provinsi Kalimantan Timur, tidak hanya meningkatkan output sektor konstruksi di wilayah itu saja, tetapi juga meningkatkan output sektor wilayah lain yang barang dan jasanya diperlukan oleh sektor konstruksi Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pembangunan IKN. Studi Sahara *et al.* (2024) dan Sukma (2015), menunjukkan bahwa tidak setiap sektor pada suatu wilayah memiliki kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasanya sendiri, sehingga kekurangan barang dan jasa tersebut akan dipenuhi oleh sektor lain baik yang berasal dari wilayah tersebut maupun dari luar wilayah tersebut. Oleh karena itu, menjadi rasional bahwa dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN, maka akan mendorong peningkatan permintaan terhadap sektor-sektor yang outputnya diperlukan untuk oleh sektor konstruksi Provinsi Kalimantan Timur. Sebagai contoh, di Pulau Jawa sektor yang mengalami peningkatan output paling besar adalah sektor industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik. Apabila dirinci, sektor tersebut merupakan sektor yang menghasilkan barang-barang hasil

pengecoran logam, bahan bangunan dari logam, barang-barang logam lainnya, dan lain-lain. Output sektor tersebut selanjutnya digunakan sebagai input yang diperlukan oleh sektor konstruksi Provinsi Kalimantan Timur dalam membangun IKN. Sehingga dengan adanya investasi/pengeluaran pemerintah pada sektor konstruksi Provinsi Kalimantan Timur maka akan memberikan dampak pada peningkatan output sektor-sektor yang berada di luar Provinsi Kalimantan Timur.

Selanjutnya, adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN sebesar Rp 75.90 triliun yang diinjeksikan pada sektor konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan dampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga yang sebarannya dapat dilihat pada Gambar 3. Secara total pendapatan rumah tangga Indonesia mengalami peningkatan sebesar Rp 23.62 triliun. Jika dilihat secara regional, dampak paling tinggi berada di Pulau Kalimantan dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 19.45 triliun. Sementara itu, dampak di luar Pulau Kalimantan secara total adalah sebesar Rp 4.17 triliun dengan peningkatan pendapatan tertinggi berada di Pulau Jawa sebesar Rp 2.89 triliun, Pulau Sulawesi sebesar Rp 921.52, Pulau Sumatera sebesar Rp 217.07 miliar, dan sebagian kecil lainnya di Pulau Bali-Nusra serta Maluku dan Papua. Peningkatan output yang terjadi sebagai akibat dari peningkatan permintaan barang dan jasa untuk menunjang adanya pengeluaran pemerintah tersebut, maka akan mendorong peningkatan pendapatan masyarakat (Permana dan Asmara, 2010; Sahani *et al.*, 2024).

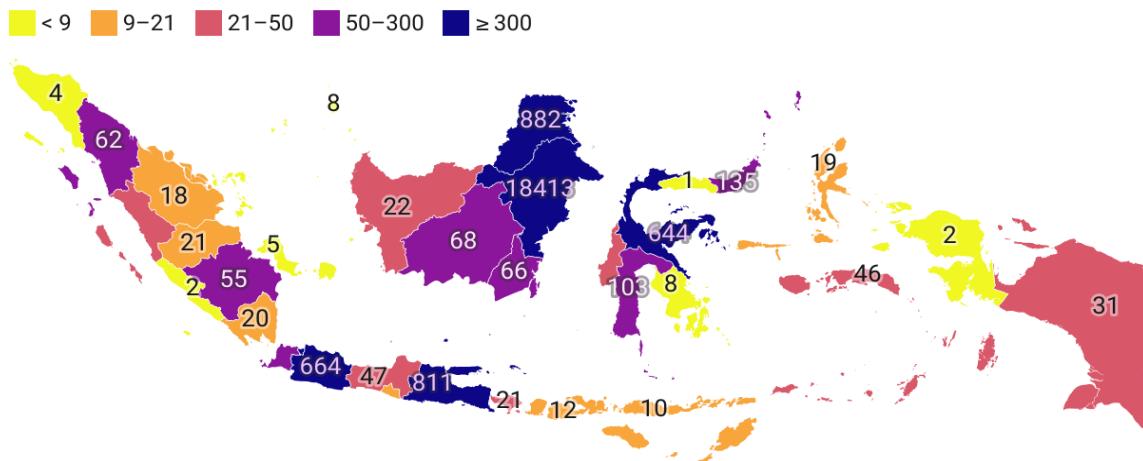
Apabila dilihat berdasarkan provinsi, maka Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling besar menerima dampak peningkatan pendapatan, yaitu sebesar Rp 18.41 triliun atau 77.95% dari total dampak adanya pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN di sektor konstruksi Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi DKI Jakarta dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 1.20 triliun, Provinsi Kalimantan Utara dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 882.43 miliar, Provinsi Jawa Timur dengan peningkatan

pendapatan sebesar Rp 810.54 miliar, Provinsi Jawa Barat dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 664.05 miliar, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 644.40 miliar. Sejalan dengan temuan Hidayah dan Sunarjo (2021) serta Messakh *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa adanya investasi yang meningkatkan output akan menyebabkan efek limpahan (*spillover effect*) terhadap peningkatan pendapatan.

Selain dilihat secara regional, dampak peningkatan pendapatan juga dapat dilihat secara sektoral, sektor yang mengalami peningkatan pendapatan paling besar di Pulau Kalimantan adalah sektor konstruksi itu sendiri, dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 13.43 triliun. Selanjutnya untuk Pulau Jawa, sektor yang mengalami peningkatan pendapatan paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 688.06 miliar. Untuk Pulau Sulawesi, sektor yang mengalami peningkatan pendapatan paling besar adalah sektor industri barang galian bukan logam dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 552.81 miliar.

Untuk Pulau Sumatera, sektor yang mengalami peningkatan pendapatan paling besar adalah sektor perkebunan semusim dan tahunan dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 63.60 miliar. Untuk Pulau Maluku dan Papua, sektor yang mengalami peningkatan pendapatan paling besar adalah sektor kehutanan dan penebangan kayu dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 50.17 miliar. Pulau Bali-Nusra, sektor yang mengalami peningkatan pendapatan paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor dengan peningkatan pendapatan sebesar Rp 11.56 miliar.

Terakhir, adanya investasi atau pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN sebesar Rp 75.90 triliun yang diinjeksikan pada sektor konstruksi di Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan dampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sebarannya dapat dilihat pada Gambar 4. Secara total penyerapan tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan sebanyak 244 389 orang.

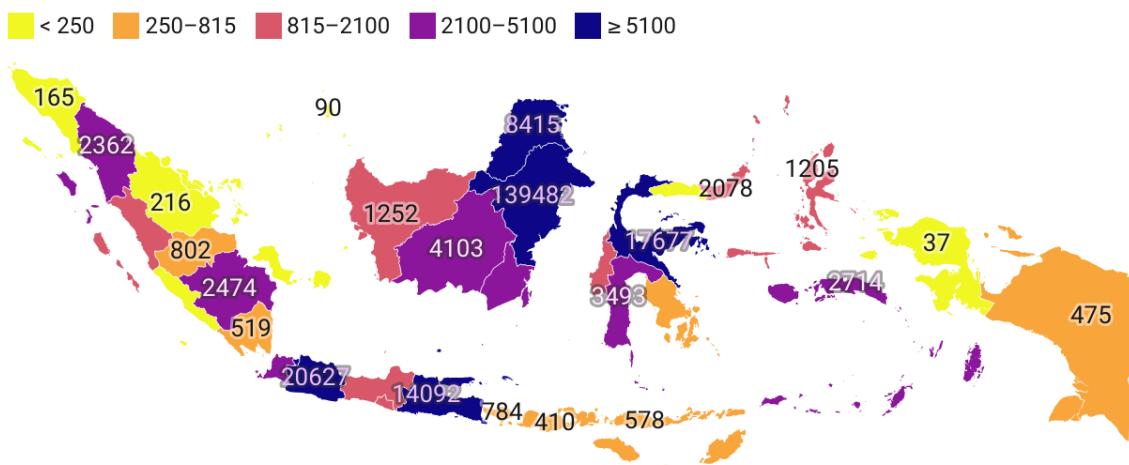
**Gambar 3.** Dampak Pendapatan dari Investasi Pembangunan IKN di Provinsi Kalimantan Timur

Jika dilihat secara regional, dampak paling tinggi berada di Pulau Kalimantan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 156 149 orang. Sementara itu, dampak di luar Pulau Kalimantan secara total adalah peningkatan tenaga kerja sebanyak 88 240 ribu orang dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja tertinggi berada di Pulau Jawa sebanyak 49 647 orang, Pulau Sulawesi sebanyak 24 776 orang, Pulau Sumatera sebanyak 7 613 orang, dan sebagian kecil lainnya di Pulau Bali-Nusra serta Maluku dan Papua.

Apabila dilihat berdasarkan provinsi, maka Kalimantan Timur merupakan provinsi yang paling besar menerima dampak peningkatan penyerapan tenaga kerja, yaitu sebanyak 139 482 orang atau 57.07% dari total dampak adanya investasi/pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN di sektor konstruksi Provinsi

Kalimantan Timur. Selanjutnya diikuti oleh Provinsi Jawa Barat dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 20 627 orang, Provinsi Sulawesi Tengah dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 17 677 orang, Provinsi Jawa Timur dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 14 092 orang, Provinsi Kalimantan Utara dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 8 415 orang, dan Provinsi DKI Jakarta dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebanyak 7 060 orang.

Selain dilihat secara regional, dampak peningkatan penyerapan tenaga kerja juga dapat dilihat secara sektoral, sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar di Pulau Kalimantan adalah sektor konstruksi itu sendiri, dengan peningkatan sebanyak 69 054 orang.



Tabel 4. Provinsi dengan Pertumbuhan Output Tertinggi akibat Pembangunan IKN

Provinsi	Deskripsi	Growth Output	Peringkat
Kalimantan Timur	Konstruksi	85.26%	1
Kalimantan Timur	Industri Barang Galian bukan Logam	66.10%	2
Kalimantan Timur	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	47.55%	3
Maluku	Kehutanan dan Penebangan Kayu	47.05%	4
Kalimantan Timur	Kehutanan dan Penebangan Kayu	35.77%	5
Kalimantan Timur	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	35.42%	6
Kalimantan Utara	Kehutanan dan Penebangan Kayu	30.27%	7
Sulawesi Tengah	Industri Barang Galian bukan Logam	29.05%	8
Kalimantan Utara	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	28.20%	9
Sulawesi Utara	Industri Barang Galian bukan Logam	25.01%	10
Kalimantan Timur	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	18.28%	11
Kalimantan Timur	Pertambangan Bijih Logam	16.44%	12
Kalimantan Timur	Pengadaan Gas dan Produksi Es	15.35%	13
Kalimantan Timur	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	13.74%	14
Kalimantan Selatan	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	11.84%	15
Maluku Utara	Kehutanan dan Penebangan Kayu	10.22%	16
Kalimantan Timur	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	9.69%	17
Kalimantan Tengah	Pertambangan Bijih Logam	9.33%	18
Kalimantan Timur	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	8.87%	19
Kalimantan Selatan	Pertambangan Bijih Logam	7.84%	20

Selanjutnya untuk Pulau Jawa, sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor dengan peningkatan sebanyak 20 356 orang. Untuk Pulau Sulawesi, sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah sektor industri barang galian bukan logam dengan peningkatan sebanyak 15 031 orang. Untuk Pulau Sumatera, sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah sektor perkebunan semusim dan tahunan dengan peningkatan sebanyak 3 769 orang. Untuk Pulau Maluku dan Papua, sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah sektor kehutanan dan penebangan kayu dengan peningkatan sebanyak 3 512 orang. Serta

untuk Pulau Bali-Nusra, sektor yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor dengan peningkatan sebanyak 668 orang. Secara teoritis, permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan terhadap output (*derived demand* dari output). Artinya, semakin banyak output yang diperlukan maka kebutuhan akan tenaga kerja pun akan semakin banyak. Sehingga menjadi rasional bahwa adanya investasi/pengeluaran pemerintah untuk pembangunan IKN, akan mendorong permintaan tenaga kerja baik terhadap sektor dan wilayah di mana investasi itu berada maupun terhadap sektor dan wilayah lain yang outputnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan investasi tersebut. Hal tersebut telah dibuktikan secara

empiris pada berbagai penelitian seperti yang dilakukan oleh Paramita dan Christianingrum (2017), Dewi dan Sutrisna (2015) serta Sulistiawati (2012).

Berdasarkan analisis dampak investasi di atas, terlihat bahwa wilayah yang mendapatkan peningkatan output, pendapatan, dan tenaga kerja tertinggi masih terbatas pada Provinsi Kalimantan Timur, beberapa provinsi dari Pulau Jawa, seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur, serta Kalimantan Utara. Hal ini memperlihatkan bahwa dampak *spillover* IKN masih berkisar antara wilayah Kalimantan Timur itu sendiri, dan Kalimantan Utara. Kalimantan Utara berfungsi sebagai daerah penyangga IKN (Koran Kaltara, 2022), yang dapat menarik investasi besar dibangun di daerah tersebut untuk mendukung IKN, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang akan menjadi salah satu pemasok listrik ke IKN (Antaranews, 2023). Sedangkan untuk wilayah Jawa, hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki daya saing daerah yang tinggi. Selain karena beberapa input penting memang masih bersumber di daerah tersebut seperti bahan logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik. Terlihat berdasarkan data di tahun 2024, mesin dan peralatan mekanis, serta perlengkapan elektronik merupakan produk unggulan manufaktur DKI Jakarta (Indonesia Exim Bank, 2024). Selain itu, adanya pertumbuhan ekonomi yang terpusat di Jawa menyebabkan Jawa menjadi pusat pergerakan barang, di mana sebesar 60% pergerakan barang berada di Jawa, yang tentunya didukung oleh pelabuhan dan angkutan lautnya (Natalia dan Agus, 2016; Kementerian Keuangan, 2023).

Dengan masih terbatasnya efek *spillover* pembangunan IKN terhadap wilayah di Indonesia, ternyata masih terdapat potensi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Timur Indonesia akibat adanya IKN. Hal ini terlihat pada potensi pertumbuhan output daerah yang cukup luas, tidak hanya di Pulau Jawa. Peningkatan nilai nominal output mungkin bisa saja terpusat di area Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan wilayah Jawa. Namun dari sisi pertumbuhan output, dalam Tabel 4, dapat ditemukan potensi output sektoral yang tumbuh cepat, dan tentunya

dapat mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. Daerah dan sektor tersebut antara lain Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk Kehutanan dan Penebangan Kayu.

SIMPULAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui investasi pemerintah sebesar Rp 75.90 triliun yang berfokus pada sektor konstruksi di Kalimantan Timur dapat menciptakan dampak ekonomi multisektoral dan multiregional. Secara geografis, analisis menunjukkan adanya efek *spillover* output, pendapatan, dan tenaga kerja yang terjadi tidak hanya di wilayah setempat, tetapi juga menyebar ke provinsi-provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Jawa Barat. Jika dilihat secara sektoral, peningkatan output tidak hanya terjadi pada sektor konstruksi, tetapi juga pada sektor-sektor terkait, seperti industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik di Pulau Jawa dan industri barang galian bukan logam di Pulau Sulawesi, mengindikasikan terjadinya keterkaitan industri yang kuat.

Hanya saja, dapat disimpulkan lebih jauh, bahwa efek *spillover* tersebut masih terbatas pada daerah Kalimantan sendiri, dan wilayah Jawa, dengan sebagian kecil wilayah Sulawesi. Dengan demikian, dapat dikatakan potensi pembangunan IKN dalam mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi masih belum tercapai. Hal ini dikarenakan pembangunan IKN yang dilaksanakan masih tergolong jangka pendek dengan fokus kegiatan ekonomi hanya pada sektor konstruksi. Selain itu, terdapat beberapa faktor pengaruh yang menyebabkan wilayah Jawa masih mendominasi sebagai penerima efek *spillover*, yaitu daya saing daerah atas produk logam, komputer, elektronik dan peralatan listrik ditambah daya saing logistik seperti kesiapan pelabuhan dan kapal angkut yang tinggi di wilayah Jawa. Namun, jika dilihat dari sisi dampak pertumbuhan output sektoral akibat pembangunan IKN, terdapat potensi percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara untuk Kehutanan dan Penebangan Kayu.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, diperlihatkan bahwa pembangunan IKN dapat mengakibatkan dua hal, yaitu dukungan terhadap percepatan pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah Barat dan Timur Indonesia atau jika tidak didukung dengan kebijakan yang tepat, justru dalam jangka panjang akan memperburuk ketimpangan antar daerah.

Untuk memperluas efek *spillover* ke wilayah di luar Kalimantan dan Jawa, diperlukan investasi pada infrastruktur transportasi dan logistik yang menghubungkan IKN dengan wilayah timur Indonesia, terutama dalam mendukung peningkatan kesiapan pelabuhan serta peningkatan layanan angkutan dan transportasi multimoda untuk memperkecil kesenjangan logistik antar wilayah. Kemudian, pemerintah perlu memperkuat jaringan pelayaran perintis dan angkutan laut antarpulau (*sea toll*) yang menghubungkan IKN dengan kawasan timur. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya logistik *antar wilayah*, terutama dari timur Indonesia ke IKN dan sebaliknya. Dengan demikian, pembangunan IKN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah yang lebih merata dan inklusif.

Kebijakan lainnya adalah mendorong pengembangan sektor ekonomi berbasis potensi lokal di wilayah yang belum maksimal menerima efek *spillover*, namun berpotensi memiliki pertumbuhan output yang tinggi, seperti kehutanan dan hasil hutan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Hal ini dapat memperkuat keterkaitan antarsektor dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dalam kaitannya dengan penelitian selanjutnya, perlu dilihat dampak dari adanya investasi swasta atas pembangunan dan pengembangan jangka panjang di berbagai sektor ekonomi di wilayah IKN.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo AG, Dwiputri IN, Maspaitella M. 2022. The Impact of Electricity Investment on Inter-Regional Economic Development in Indonesia: An Inter-Regional Input Output (IRIO) approach. *Journal of Socioeconomics and Development*. 5(1): 1-12. <https://doi.org/10.31328/jsed>
- Amila S, Nugraha AA, Sukron A, Rohmah F. 2023. Analisis Dampak dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 2(1):10-18.
<https://ejournal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/867>
- Antara News Kaltara. 2023. Sektor Konstruksi Kaltara Tumbuh 6.29% karena Proyek Strategis. *Antara News Kaltara*, Februari 28.
https://kaltara.antaranews.com/berita/504_252/sektor-konstruksi-kaltara-tumbuh-629-persen-karena-proyek-strategis.
- Ariutama IGA, Saputra AH, Muis MA, Nugroho A. 2022. The Impact of Fiscal Stimulus on Agriculture Sector in Bali: Interregional Input-Output Analysis. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 6(2): 152-167.
<https://doi.org/10.31092/jmfp.v6i2.1956>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). 2022. Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Berdasarkan Lokasi 2022.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Tabel Interregional Input-Output Tahun 2016 Tahun Anggaran 2021 [publikasi]. [diunduh pada Mei 2023]. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/publication/2021/1/2/29/3ea49c0d856eceaba836792d/tabel-interregional-input-output-indonesia-tahun-2016-tahun-anggaran2021.html>.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi(ribu rupiah), 2021. Tersedia pada: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YWtoQIRVZzNiMU5qU1VOSIRFeFZiRTR4VDJOTVVUMDkjMw%3D%3D/produk-domestik-regional-bruto-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-provinsi--ribu-rupiah---2022.html?year=2021>
- Dewi NMS, Sutrisna IK. 2015. Pengaruh investasi dan ekspor terhadap penyerapan tenaga kerja melalui pertumbuhan ekonomi.

- Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana.* 4(6): 621-636. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/12254>
- Disparities, I. I. (2018). The Impacts of Public Spending by Function on Regional Economic Growth. Applied Analysis of Growth, Trade, and Public Policy: Ten Years of International Academic Exchanges Between JAAE and KEBA, 209.
- Hidayah F, Sunarjo DA. 2021. Hubungan Antar Sektor dan Daerah dalam Perekonomian Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 (*An Inter-Regional Input-Output Analysis*). *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*. 1(3): 244-260. <https://doi.org/10.11594/jesi.01.03.10>
- Hidayat S. 2021. Dampak Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang terhadap Perekonomian Banten dan Nasional (Analisis Interregional Input-Output). *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*. 14(2): 393-405. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v14i2.93>
- Hung CC, Hsu SC, Pratt S, Chen PC, Lee CJ, Chan AP. 2019. Quantifying the linkages and leakages of construction activities in an open economy using multiregional input-output analysis. *Journal of Management in Engineering*. 35(1): 04018054. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ME.1943-5479.000065](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.000065)
- Jahn M. 2015. A location quotient-based interregional input-output (IRIOLQ) framework (No. 161). HWI Research Paper.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. *National Logistics Ecosystem*. Diakses Mei 28, 2025. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/National-Logistics-Ecosystem>
- Kementerian Keuangan. 2024. APBN Kita: Alokasi Pendanaan Pembangunan IKN dari APBN Tahun 2022-2024. Jakarta (ID).
- Koran Kaltara. 2022. "Provinsi Termuda Penyanga Ibukota Negara." *Koran Kaltara*, September 14. <https://korankaltara.com/provinsi-termuda-penyaibukota-negara>.
- Lee KD, Moon S, Choi J. 2018. The Impacts of Public Spending by Function on Regional Economic Growth. Applied Analysis of Growth, Trade, and Public Policy. Springer. 2018: 209-237
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). 2024. Proyeksi Pertumbuhan Ekspor Jakarta Meningkat hingga Tahun 2025. Diakses Mei 28, 2025. <https://www.indonesiaeximbank.go.id/public-information/proyeksi-pertumbuhan-ekspor-jakarta-meningkat-hingga-tahun-2025>.
- Luque CA, Haddad EA, Lima GT, Sakurai SN, Costa SM. 2011. Impact assessment of interregional government transfers in Brazil: an input-output approach. Munich Personal RePEc Archive. 31292: 1-24.
- Messakh TA, Rustiadi E, Putri EIK, Fauzi A. 2021. Dampak Sektor Transportasi Terhadap Perekonomian di Timor Barat: Suatu Analisis Model Input-Output (IO). *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*. 9(2): 127-141. <https://doi.org/10.14710/jwl.9.2.127-141>
- Miller RE, Blair PD. 2009. Input-output analysis: foundations and extensions. Cambridge university press.
- Natalia, Christine, dan Mia Audina Agus. 2016. Desain Rute Pelayaran Sistem Hub and Spoke (Studi Kasus: Wilayah Papua, Indonesia). *Jurnal Metris* 17: 113–122. <https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/metris/article/view/2941>
- Okadera T, Okamoto N, Watanabe M, Chontanawat J. 2014. Regional water footprints of the Yangtze River: an interregional input-output approach. *Economic Systems Research*. 26(4): 444-462. <https://doi.org/10.1080/09535314.2014.934324>
- Paramita R, Christianingrum R. 2017. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga

- Kerja. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara.* 2(1): 32-50.
- Permana CD, Asmara A. 2010. Analisis peranan dan dampak investasi infrastruktur terhadap perekonomian indonesia: analisis input-output. *Jurnal Manajemen & Agrisnis.* 7(1): 48-58.
<https://doi.org/10.17358/jma.7.1.48-58>
- Purnomo B. 2024. Analisis Input Output 2016 Nasional; Dampak Ekonomi Atas Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi.* 3(3): 1375-1382.
https://melatijournal.com/index.php/jism_a/article/view/583
- Republik Indonesia. 2024. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987.
- Sahani SK, Sah BK, Sahani K, Das R, Mahato AK. 2024. Mathematical input-output analysis for economic impact assessment: A case study on local government's bridge construction project. *Alifmatika: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika.* 6(2): 279-292.
- <https://doi.org/10.35316/alifmatika.2024.v6i2.279-292>
- Sahara, Hermanto S, Pratinda WNAS, Purnama IG, Zhafira ET, Rahmah A, Saban AB. 2024. Inter Regional Input-Output. IPB Press.
- Sahara. 2017. Analisis Input-Output: Perencanaan Sektor Unggulan. IPB Press.
- Sukma AF. 2015. Efek pengganda infrastruktur pekerjaan umum dalam perekonomian Provinsi Bali. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota.* 26(2): 100-110.
<https://journals.itb.ac.id/index.php/jpwk/article/view/1429>
- Sulistiwati R. 2012. Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan Ekonomi dan penyerapan tenaga kerja serta kesejahteraan masyarakat di Provinsi Indonesia. *Jurnal ekonomi bisnis dan kewirausahaan.* 3(1): 29-50.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JJ/article/view/9888>
- Zhang B, Chen ZM, Xia XH, Xu XY, Chen YB. 2013. The impact of domestic trade on China's regional energy uses: A multi-regional input–output modeling. *Energy Policy.* 63: 1169-1181.
<https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.08.062>